

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi pada tujuan-tujuan individu tetapi tujuan utama adalah hasil utama untuk organisasi. Teori ini menjelaskan situasi manajer selaku steward yang mana bertindak sesuai pemilik dimana manajer bertindak untuk kepentingan bersama. Ketika kepentingan pemilik sumber daya dengan manajer berbeda, steward berusaha menjalin kerja sama dengan pemilik untuk tidak menentang kepentingan pemilik, karena bagi steward kepentingan bersama merupakan hal yang lebih penting untuk mencapai kepentingan organisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan pemilik dengan kesuksesan organisasi, namun demikian steward juga memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup (Raharjo,2017).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi

berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan laporan keuangan tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi.

Hubungan antara *steward* dengan pemilik sumber daya didasari dengan kepercayaan, kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. *Stewardship theory* merupakan model yang dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik. Kesuksesan *steward* dapat dinilai dari meningkatnya kinerja yang dihasilkan serta dapat memberikan manfaat pada sebagian besar organisasi lain, teori *stewardship* ini sejalan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah sebagai *steward* yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik, pemerintah sebagai *steward* memiliki tugas melayani publik dan juga mensejahterakan masyarakat. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya, dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, serta mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

2. Teori Keagenan

Teori keagenan memiliki prinsip utama berupa hubungan kerja antara dua pihak yaitu pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam suatu bentuk kerja

sama. Agen berperan sebagai pihak yang diberikan kontrak oleh *principal* untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Teori keagenan dapat diartikan dimana adanya suatu hubungan diantara 2 pihak yaitu *principal* dan agen yang diperintah untuk suatu pekerjaan atau jasa dalam suatu kontrak yang mengatasnamakan *principal* dan memberikan kebebasan penuh untuk agen dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Mengacu pada teori agensi, pemegang amanah (agen) memiliki kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Masalah keagenan muncul ketika pemerintah sebagai agen cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampai dengan menyajikan laporan keuangan.

Keterkaitan adanya teori agensi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agen) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai *principal* untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung maupun tidak

langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan

3. Teori Kompetensi Spencer

Penelitian ini menggunakan kompetensi spencer untuk menjelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia. Secara sederhana kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam buku yang berjudul *competence at work* dijelaskan bahwa, kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dan dapat digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Kompetensi juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dengan kriteria tertentu. Ada lima karakteristik kompetensi yang disebutkan oleh Spencer dan Spencer (1993), yaitu *motivates* (suatu hak yang membuat seseorang secara konsisten melakukan tindakan tertentu), *traits* (sifat seseorang dalam merespon situasi tertentu), *self concept* (sikap seseorang), *knowledge* (pengetahuan dibidang tertentu), dan *skills* (kemampuan yang dimiliki pada bidang tertentu).

Disebutkan pula bahwa di masa depan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbasis kompetensi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan adanya tindakan responsif untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengembangan kompetensi dapat berupa upaya

pengembangan pengetahuan dan sumber daya manusia. Perubahan lingkungan organisasi yang terjadi, menuntut individu mampu menjawab tantangan tersebut dengan menunjukkan kinerjanya (Moehariono, 2009).

4. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses mencatat, menilai, dan mengidentifikasi semua transaksi bisnis yang terjadi pada entitas Pemerintah Daerah, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. *Output* berupa laporan keuangan dari Akuntansi Keuangan Daerah ditujukan kepada pihak-pihak seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), kreditor, investor, donatur, dan pihak berkepentingan lainnya. Menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006, sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian proses mulai proses pengumpulan, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi serta pelaporan dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, Pemerintah Daerah telah menggunakan media internet atau berbasis *online* dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, hal ini merupakan cara yang paling efektif dan efisien yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun atau menyajikan laporan keuangan. Dengan adanya penyusunan laporan keuangan berbasis *online*, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dituntut untuk lebih cepat, akurat, dan tidak terdapat salah saji yang material

namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi ketidak akuratan penyusunan ataupun penyajian laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu tujuan SAKD adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat & akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal & relevan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal.

Menurut Halim (2012), Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik dimana seluruh transaksi dicatat lalu dilaporkan pada publik yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi keuangan.

Akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah, dengan cara single entry, double entry, dan triple entry. Metode pencatatan triple entry merupakan sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran, pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan triple entry, maka dapat dilihat sisa anggaran

masing-masing komponen yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam struktur pemerintahan di daerah, SKPD merupakan entitas yang berkewajiban untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada dalam lingkungannya.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, terdapat empat proses dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yaitu prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan proses akuntansi selain kas. Proses-proses tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh bendahara. Sementara itu adapun output laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pengendalian intern merupakan bagian dari pengendalian manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas suatu laporan keuangan. Sistem pengendalian internal meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan (Putra, 2018). Menurut Warren *et al.* (2005), tujuan dari sistem pengendalian internal salah satunya adalah mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem

akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kekeliruan pada kinerja pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal memiliki fungsi dalam memberikan keyakinan yang memadai dan tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam menciptakan keandalan laporan keuangan (Mahaputra & Putra, 2014). *Comitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) menyebutkan 5 komponen pengendalian internal yang harus diterapkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian adalah seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melakukan pengendalian internal diseluruh organisasi.
- b. Penilaian risiko dilakukan karena ada anggapan bahwa akan selalu ada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak buruk terhadap pencapaian tujuan organisasi yang melalui proses dinamis berulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko.
- c. Aktivitas pengendalian adalah tindakan yang dilakukan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian suatu tujuan.
- d. Informasi dan komunikasi diperlukan bagi entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung tercapainya tujuan. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan dan berkualitas baik dari sumber internal maupun eksternal untuk mendukung berfungsinya pendampingan pengendalian internal lainnya.

Komunikasi adalah proses penyampaian, berbagi, dan memperoleh, informasi yang terus menerus berulang.

- e. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah masing-masing komponen pengendalian internal telah dilaksanakan dan berfungsi maka dilakukan evaluasi. Terdapat tiga jenis evaluasi yang dapat dilakukan yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan kombinasi dari keduanya.

Teori COSO menjelaskan tentang efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah. Di Indonesia, sistem pengendalian internal untuk organisasi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah diawasi langsung oleh inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

6. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan kegiatan (Gomes, 2003). Manusia adalah salah satu faktor sumber daya yang sangat penting dalam upaya tercapainya tujuan dalam organisasi, sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau

suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien,

SDM yang berkompeten harus memiliki karakteristik yang terdiri dari kemampuan, pengetahuan, dan perilaku. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan sumber daya yang berkualitas untuk mewujudkan nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. SKPD memerlukan SDM yang memahami tugas pokok fungsinya, yang memahami teknis pekerjaan dengan baik ataupun sumber daya manusia yang sering mengikuti berbagai pelatihan akuntansi dan memiliki pengalaman yang banyak di bidang akuntansi. Oleh karena itu SDM yang berkualitas sangat dibutuhkan serta diharapkan dapat memahami dan menerapkan logika akuntansi dengan benar agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan agar terhindar dari kekeliruan pada informasi yang disajikan.

7. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Lillrank, 2003). Maka dari itu,

segala informasi yang ada di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berkualitas dan bermanfaat bagi kebutuhan para pemakainya. Selain itu pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dengan seksama untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 juga menyebutkan bahwa segala informasi akuntansi yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila laporan keuangan dibuat dengan tepat waktu dan informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan para pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa di masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

b. Andal

Informasi di dalam laporan keuangan dapat dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan bebas dari kesalahan yang

material, bersifat netral, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat Difahami

Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang disediakan dan dimaksudkan.

B. Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Halim dan Kusufi (2013), sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengumpulan data, pencatatan, pengihktisaran sampai dengan pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Salah satu usaha untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan, dimana teori ini yang mendasari pelaporan keuangan organisasi

sektor publik. Dalam menyusun laporan keuangan, agen dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban menyajikan dan melaporkan informasi yang relevan sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat yang dalam hal ini sebagai prinsipal.

Dalam penelitian yang dilakukan Mahaputra & Putra (2014) serta Andini & Yusrawati (2015) menemukan bahwa penerapan SAKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Banyak pihak yang mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan harus disajikan secara wajar dan terbebas dari salah saji. Sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pelaporan keuangan memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban, manajerial, hingga pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan, apabila laporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik yang artinya memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, sesuai dengan pedoman, hingga dalam bentuk dan waktu yang tepat, maka kualitas dari laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₁: Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Menurut Rai (2008), Sistem pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang dalam rangka untuk memberikan keyakinan bagi manajemen bahwa suatu organisasi tersebut mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena suatu kegiatan operasional memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu membatasi dan mengkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah menemukan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi pada saat pencapaian tujuan pada suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan seringkali terjadi permasalahan umum seperti kesalahan pada administrasi, kesalahan dalam pengelolaan keuangan, serta korupsi. Teori yang sejalan dengan sistem pengendalian intern dalam penelitian ini adalah Teori stewardship. Teori ini sejalan dengan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah sebagai steward yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik. Pemerintah sebagai steward memiliki tugas melayani publik dan juga mensejahterakan masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan Kiranayanti & Erawati (2016) serta Munasyir (2015), menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Suatu organisasi termasuk pemerintah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap kegiatan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka segala kegiatan terutama di bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Kompetensi SDM memoderasi pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yakni LKPD yang mengacu pada SAP. Dalam hal ini, sumber daya yang berkompeten sangatlah dibutuhkan, karena kompetensi dan kualitas sumber daya dapat mencapai kesuksesan pekerjaannya (Kartopawiro & Susanto, 2018). Hal ini sejalan dengan Teori Kompetensi Spancer, menurut teori ini kompetensi mengacu pada pengetahuan, perilaku, dan kemampuan. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap individu dan dalam hal ini kemampuan digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja suatu organisasi.

Untuk mencapai tujuan pemerintahan, keuangan beserta laporannya harus dikelola dengan baik, yaitu berdasarkan asas umum, yang meliputi harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggungjawab. Laporan keuangan menjadi input bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan tersebut menjadi bahan bagi DPRD dan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan. SAKD sebagai alat atau sistem dalam menyusun laporan keuangan yang mana keberhasilannya dalam penerapan SAKD yang dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan sangat tergantung pada kompetensi sumber daya manusia yang menjalankan SAKD. Maka dari itu dalam pengelolaannya dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi untuk dapat memahami SAKD secara keseluruhan agar dapat tercipta laporan keuangan daerah yang berkualitas, dan terhindar dari salah saji, karena laporan keuangan yang disusun secara tertib memerlukan sumber daya manusia yang menguasai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Kompetensi SDM memperkuat pengaruh hubungan antara penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

4. Kompetensi SDM memoderasi pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sistem pengendalian intern adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang dikoordinasikan di dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta yang dimiliki organisasi, memeriksa kebenaran dan ketelitian data akuntansi, mendorong efisiensi, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan (Pratolo dkk, 2016). Sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dalam pengelolaan keuangan daerah adanya SDM yang memiliki mutu baik dalam menyusun laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Adapun unsur-unsur dari kompetensi meliputi, pertama kemampuan intelektual, unsur ini berhubungan dengan kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun pengalaman. Kedua, kemampuan kompetensi jejaring kerja sama, unsur ini terbentuk dari hubungan kerjasama di antara anggota organisasi yang mau memberikan komitmen untuk maju bersama. Ketiga, kompetensi kredibilitas, apabila unsur – unsur kompetensi terpenuhi, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena dalam hal meningkatkan kualitas laporan keuangan itu sendiri tergantung pada kompetensi SDM yang menerapkan SPI dengan baik.

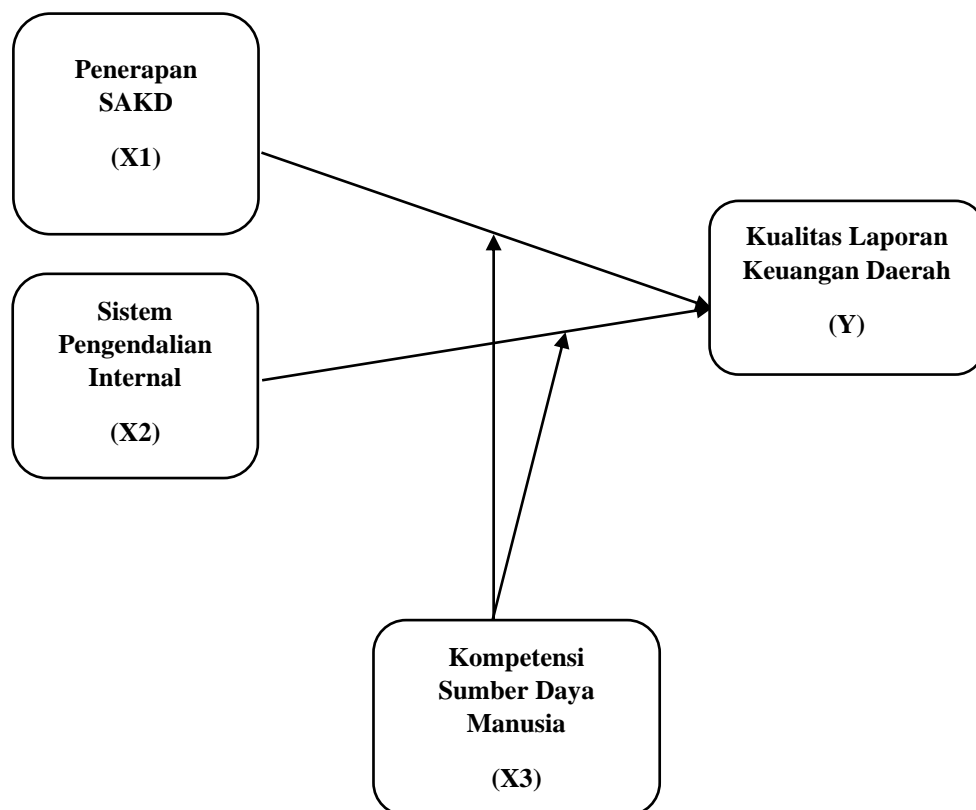
Dalam hal ini sejalan dengan Teori Kompetensi Spancer, berdasarkan teori ini kompetensi mengacu pada pengetahuan, perilaku dan kemampuan. Kompetensi terletak pada bagian dalam setiap individu dan dalam hal ini kemampuan merupakan strategi yang diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja suatu organisasi.

Penelitian Agustiawan & Rasmini (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern, terhadap kualitas laporan keuangan. Pemahaman yang tepat atas penerapan suatu sistem pengendalian intern tentunya tidak lepas dari peranan kompetensi sumber daya manusia yang menggunakannya. Pemahaman yang tepat akan sistem pengendalian intern memungkinkan penerapan yang konsisten serta pemanfaatan yang memberikan hasil yang lebih maksimal dalam pengelolaan ataupun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Kompetensi SDM memperkuat pengaruh hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

C. Model Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel independen penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:



Gambar 2.1
Model Penelitian